



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

NOMOR: 19/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pedoman Teknis Tata cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan Lembaran Negara Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 4186;

3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013.

KEDUA : Tata Cara Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013

Meliputi :

1. Definisi kampanye ;
2. Ketentuan umum;
3. Prinsip kampanye;
4. Kriteria kampanye;
5. Pelaksana kampanye;
6. Peserta kampanye;
7. Materi kampanye;
8. Fasilitas kampanye;
9. Pengawasan kampanye;
10. Bentuk kampanye;
11. Jadwal kampanye;
12. Dana kampanye;
13. Pelaporan dana kampanye;
14. Audit dana kampanye;
15. Larangan kampanye;
16. Sanksi kampanye;

KETIGA : Rincian Tata Cara Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 sebagaimana terdapat Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Formulir-formulir yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A L O P O

Pada tanggal : 26 Juni 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
KETUA,**

Salinan sesuai dengan aslinya

TTD

MAKSUM RUNI S.Ag., MH.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
2. DPRD Kota Palopo
3. Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Palopo;
4. Panwaslu Kota Palopo;
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
6. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR : 19/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013

I. PENGERTIAN KAMPANYE

Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam merekomendasikan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk pertemuan-pertemuan, iklan, dan pemasangan alat peraga kampanye.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, selanjutnya Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Palopo untuk memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Palopo masa jabatan 2013-2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, selanjutnya disebut KPU Kota Palopo, adalah lembaga penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Palopo untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.

4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut PPS adalah Panitia yang di bentuk oleh KPU Kota Palopo untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo di tingkat Kelurahan dan bersifat sementara.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kota Palopo untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kota Palopo, selanjutnya disingkat Panwaslu Kota Palopo, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo di wilayah Kota Palopo.
7. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, selanjutnya disebut Tim Kampanye Pasangan Calon, adalah Tim yang dibentuk dan disusun oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang telah didaftarkan di KPU Kota Palopo.
8. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah diakreditasi oleh KPU Kota Palopo yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum luar negeri.
9. Pemantauan pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau.
10. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo, selanjutnya disebut DPRD Kota Palopo.
12. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
13. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan dan atau yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan,

yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palopo.

14. Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan dua tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kota Palopo.
15. a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi;
c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan satu strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat politik.
16. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari ini pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
17. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
18. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang membuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
19. Bahasa kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk

keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut KPID.

21. Jumlah hari adalah dihitung dari kalender.

III. PRINSIP KAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

2. Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1, dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

3. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

IV. KRITERIA KAMPANYE

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Dilaksanakan oleh pasangan calon atau tim kampanye/juru kampanye;
2. Dilakukan untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya;
3. Dilakukan untuk menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo , dan
4. Diselenggarakan pada jadwal waktu dan wilayah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka IV bersifat kumulatif.

V. PELAKSANAAN KAMPANYE

Pelaksana kegiatan kampanye adalah sebagai berikut :

1. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye di seluruh wilayah Kota Palopo.

2. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon perseorangan, pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
3. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh tim kampanye.
4. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
5. Tim kampanye dan juru kampanye dibentuk ditingkat Kota Palopo dapat dibentuk di tingkat Kecamatan yang pada masing-masing tingkatan memiliki Kantor/Sekretariat.
6. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 5 harus didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sesuai dengan tingkatannya bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon, atau paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai, dengan menggunakan formulir model AB-KWK-KPU (terlampir) dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kota Palopo;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
7. Tim Kampanye dan juru kampanye tingkat Kota Palopo wajib menyerahkan rekening khusus dana kampanye dalam satu bank nasional atau swasta yang memiliki jaringan di Kota Palopo pada saat pengembalian formulir Model AB-KWK-KPU (formulir pendaftaran identitas tim kampanye)

VI. PESERTA KAMPANYE

1. Peserta kampanye terdiri anggota masyarakat
2. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah Warga Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

VII. MATERI KAMPANYE

Ketentuan tentang materi dan penyampaian materi adalah sebagai berikut :

1. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tulisan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dan masyarakat pemilih.
2. Pengertian visi, misi dan program pasangan calon adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan di Kota Palopo;
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang di ajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 - c. Program yaitu uarain berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktik untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi
3. Visi, misi, program sebagaimana dimaksud dalam poin 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota.
4. Materi kampanye berisi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif.

VIII. FASILITAS KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dan memberikan informasi mengenai fasilitas umum untuk digunakan kampanye.
2. Pemerintah Kota Palopo memberikan fasilitas umum yang sama yang dapat digunakan untuk kampanye.

IX. PENGAWASAN KAMPANYE

1. Panwas Kota wajib menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, pemantau pemilu, dan /atau peserta pemilu mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dilakukan penelitian, pemeriksaan, untuk menentukan kualifikasi jenis pelanggaran tidak mengandung unsur pidana, administrasi dan tidak pidana.

3. Laporan Sengketa Penyelenggaraan Pemilu dan tidak mengandung unsur tindak pidana yang melibatkan pasangan calon/tim kampanye dan/atau masyarakat diselesaikan oleh Panwaslu.
4. Pelanggaran yang bersifat teknis administratif pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu, disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk ditindak lanjuti.
5. Pelanggaran yang mengandung unsur tidak pidana dan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwas diteruskan kepada penyidik.

X. BENTUK KAMPANYE

1. Pertemuan terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas harus berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. Dilaksanakan didalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup.
- b. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi , 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama, pembicara, dan penanggung jawab.
- d. Pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada Komisi pemilihan Umum Kota Palopo serta pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang.
- e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye ditempat pertemuan terbatas.
- f. Atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan

tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

g. Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 1, dimulai dari pukul 08.00 WITA dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WITA.

2. Tatap muka dan dialog :

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog harus berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. Dilaksanakan diruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- b. Diadakan dialog dengan bersifat interaktif;
- c. Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab.
- e. Pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo serta pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang ;
- f. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog ;
- g. Atribut pasangan calon sebagaimana di maksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog ;
- h. Kegiatan kampanye sebagaimana di maksud pada poin 2, dimulai dari pukul 08.00 WITA dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WITA, atau dimulai 19.00 WITA dan berakhir selambatnya pada pukul 22.00 WITA.

3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik :

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media massa, media cetak, dan media elektronik harus berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. Dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
 - b. Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik ;
 - c. Pada masa kampanye, media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sebagai media penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon.
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi :
Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi harus berpedoman pada ketentuan berikut :
 - a. Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
 - b. Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio, atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye;
 - c. Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :
 - 1) menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilihan lainnya ;
 - 2) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan ;
 - 3) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat pada siaran atau dianggap tidak pantas dan tidak lazim ;
 - 4) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu ;
 - 5) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak .

- d. lembaga penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali ;
- e. lembaga penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- f. Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Siaran iklan dan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberikan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata “**IKLAN**” pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhiri segmen siaran iklan pada radio ;
- h. Untuk dapat menjamin keadilan bagi tiap pasangan calon, frekuensi, durasi siaran iklan ditetapkan sebagai berikut
 - 1) batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye ;
 - 2) batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap pasangan calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye .
- i. Batas maksimum pemasangan iklan-iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h berlaku untuk semua jenis iklan ;
- j. Pihak lain dari luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran ;
- k. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye berupa kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik ;

- I. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum :
 - a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau ditempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cendramata (korek api, gantungan kunci, pin, accessories lain, minuman yang tidak beralkohol dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon;
 - b. penyebaran bahan kampanye kepada umum di tempat-tempat umum dapat dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari selama masa kampanye oleh seluruh pasangan calon dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan publik;
 - c. penyebaran bahan kampanye tidak boleh dilakukan ditempat pasangan lain berkampanye
6. Pemasangan alat peraga di tempat umum :

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum berpedoman pada ketentuan berikut :

 - a. KPU Kota Palopo, PPK, PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palopo, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa atau sebutan lain, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti, mesjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
 - c. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan ;

- d. Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan Daerah setempat;
- e. Pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya ;
- f. KPU Kota Palopo berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut ;
- g. Pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut ;
- h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

7. Rapat Umum :

Kampanye dalam bentuk Rapat Umum wajib berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. Dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan atau warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung) tempat- tempat tersebut ;
- b. Dimulai pada pukul 08.00 WITA dan berakhir paling pukul 17.00 WITA ;
- c. Harus menyesuaikan dengan hari-hari besar perayaan agama dan waktu ibadah ;
- d. Dilaksanakan diruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- e. Dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain ;
- f. Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo serta pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah orang yang akan hadir ;
- g. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, symbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

8. Debat publik/debat terbuka

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan dalam bentuk Debat publik/debat terbuka antar calon diatur sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dan disiarkan langsung oleh media elektronik ;
- b. Dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan beda untuk calon Walikota dan Wakil Walikota diserahkan kepada masing-masing pasangan calon ;
- c. Panelis debat pasangan calon di pilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dari kalangan profesional dan akademis yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon ;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi ;
- e. Format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang di pilih Komisi Pemilihan Umum Kota harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat;
- f. Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon disertai undangan tertulis dalam jumlah terbatas dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo yang dikoordinasikan dengan tim kampanye pasangan calon.

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan :

Kampanye dalam bentuk Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan diatur sebagai berikut :

- a. Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olahraga, kegiatan sosial-keagamaan dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu ;
- b. Kampanye sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin 9 wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ;

- c. Dilaksanakan dari pukul 08.00 WITA dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WITA atau dimulai 19.00 WITA dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 22.00 WITA.
10. Semua bentuk kampanye diatas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polres Kota Palopo selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada :
- a. Pokja Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ;
 - b. Panwas Pemilu Kota Palopo ;
 - c. PPK tempat kampanye ;
 - d. Panwas Kecamatan Tempat Kampanye ;
11. Pemberitahuan pelaksanaan kampanye tersebut meliputi : maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, jenis dan jumlah kendaraaan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kampanye.

XI. JADWAL KAMPANYE

- 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan kampanye, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon melalui tim kampanye paling lambat 3 (hari) setelah penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat.
- 2. Hari pertama kampanye di lakukan rapat paripurna DPRD Kota Palopo dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- 3. Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat kota Palopo.
- 4. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 12 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo bersama tim kampanye dapat mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, dan lokasi kampanye khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum dan kampanye melalui media elektronik.

6. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada poin 5 dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo diatas kertas bermaterai cukup .
7. Kesepakatan bersama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum kampanye dimulai, dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Pasangan calon/tim kampanye;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 - c. Panwaslu Kota;
 - d. Pemerintah Kota Palopo ;
 - e. Polres Kota Palopo
 - f. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ;
8. Dalam hal jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh salah satu pasangan calon, maka jadwal waktu kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain;
9. Khusus pelaksanaan kampanye melalui media elektronik dikoordinasikan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

XII. DANA KAMPANYE

1. Pengaturan dana kampanye :
 - a. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
 - b. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari :
 - 1) pasangan calon bersangkutan;
 - 2) partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon; dan
 - 3) sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - c. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa uang, barang dan/jasa.

- d. Dana kampanye berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan hukum swasta non pemerintah.
- e. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas .
- h. Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, f, dan g, wajib dicatat dalam pembukuan khusus dan kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pasangan calon pada Bank Nasional/Swasta yang berada di lingkungan Kota Palopo.
- i. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- j. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud huruf b wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
- k. Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- l. Pasangan calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye Dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.

- m. Laporan penerimaan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada huruf l mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
 - n. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.
2. Larangan dalam penerimaan dana kampanye
- a. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
 - 1) Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga Negara asing ;
 - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya ;
 - 3) pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
 - b. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada poin a tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kota Palopo dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
 - c. Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin b dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

XIII. PELAPORAN DANA KAMPANYE

- 1. Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
- 2. Laporan penerimaan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada poin 1 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Calon sebagai mana dimaksud pada poin 1 kepada masyarakat

melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.

4. Pasangan calon melalui tim Kampanye di tingkat Kota Palopo melaporkan penggunaan Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo paling lama 3 (hari) setelah berakhirnya pemungutan suara.
5. Tata cara pelaporan kampanye mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

XIV. AUDIT DANA KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari pasangan Calon dan tim kampanye sebagaimana dimaksud XIII kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
2. Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah di terimanya laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan.
5. Kantor Akuntan Publik yang di tunjukan paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye; dan

- b. Membuat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemerikasaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon ;
- c. Ketentuan tata cara audit dana Kampanye pasangan mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku .

XV. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
2. Segala kegiatan pasangan calon termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat di kategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur kampanye sebagaimana dimaksud pada angkat IV
3. Dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 ;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. menghasut atau mengadu domba pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - g. merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan oleh kendaraan bermotor di jalan raya;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon serta foto pasangan calon hanya dipasang dihalaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon dan tempat yang di tempatkan oleh komisi pemilihan umum Kota Palopo.
4. Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang;
- a. melakukan pawai kendaraan bermotor diluar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan;
- a. hakim pada semua peradilan;
 - b. pejabat BUMN/BUMD;
 - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang undangan;
 - d. lurah dan camat.
6. Pejabat Negara yang menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan;
- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keterlangsungan tugas penyelenggara pemerintah daerah.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud poin 6 berlaku bagi pejabat Negara yang tidak menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi ikut melaksanakan kampanye dari salah satu pasangan calon.

8. Kepala daerah yang menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota harus menjalani cuti diluar tanggungan Negara pada saat melakukan kampanye.
9. Kepala daerah yang menjadi calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

XVI. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi.
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, atau telah terjadi gangguan keamanan dengan menggunakan formulir AB 1-KWK yang di tanda tangani oleh ketua komisi pemilihan umum Kota Palopo dan di buburi cap komisi pemilihan umum Kota Palopo sesuai dengan tingkatannya yang bersifat final.
 - b. Peringatan tertulis/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf A, menggunakan formulir model AB 1-KWK KPU di buat dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksanaan kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk pengawasan pemilu sesuai tingkatannya; dan
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip komisi pemilihan umum Kota Palopo dan Komisi Pemilihan Kota Palopo.
- 2 Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana di maksud dalam angka XV poin 3 huruf a, b, c, d, e, f, h dan k dikenai sanksi tindak pidana sesuai undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan/atau kitab undang-undang hukum pidana.
- 3 Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagai mana di maksud pada angka XV poin 3 huruf g, I, j, dan l sanksi dengan tahapan .
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.

- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau sesuatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan.

XVII. PENUTUP

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo bersama tim kampanye tingkat Kota melaksanakan kesepahaman dan kesepakatan kampanye damai di tingkat Kota, dan kegiatan serupa dapat dilaksanakan di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan .
2. Formulir –formulir yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur di dalam keputusan ini, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Palopo
Pada tanggal : 26 Juni 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
KETUA,**

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
NOMOR : 19/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

TENTANG :
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA PALOPO TAHUN 2013.

CONTOH FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA PALOPO
TAHUN 2013

1. NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (Model AB KWK);
2. PERINGATAN TERTULIS/ PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (Model AB 1-KWK)
3. PEMBATALAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO (Model AB 2-KWK)
4. SURAT PERMOHONAN CUTI (Model AB 5-KWK).

Palopo, 2012
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
KETUA,

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.

NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA PALOPO
TAHUN 2013

Nama pasangan calon :
Nomor urut penetapan KPU Kota Palopo :
Nomor rekening khusus dana :
Kampanye pasangan calon :
Tim kampanye :

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut yaitu:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2012
Yang mengajukan

Tembusan :

- 1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2.1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3.1 (satu) rangkap untuk Bawasiu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 4.1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai dengan tingkatannya.

Catatan : Jumlah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat di sesuaikan.

PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA PALOPO
TAHUN 2013

Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal2012

2. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo

Nomor dan nama pasangan calon :

.....

Nama anggota tim kampanye :

.....

Nama anggota juru kampanye :

.....

Sehubungan dengan telah di nyatakan melanggar ketentuan kampanye pemilihan sebagai mana di maksud dalam Pasal....., Pasal....., dan Pasal..... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal, Pasal....., Pasal..... Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, dan Pasal....., Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor.....,

3. Demikian untuk di laksanakan.

Palopo,.....2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

KETUA,

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.

Tembusan :

1.1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2.1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

3.1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;

4.1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai dengan tingkatannya

Catatan :

1.Jumlah dan nama psangan calon Walikota dan Wakil Walikota/Anggota tim kampanye/anggota juru kampanye dapat di sesuaikan;

2.ketentuan pasal yang di langgar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan peraturan Nomor 6 tahun 2005, tentang pilkada, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

*)Coret yang tidak perlu

PEMBATALAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA PALOPO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal2012

2. Memutuskan:

Membatalkan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/tim kampanye sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo. Sehubungan telah di nyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di maksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Palopo,2012
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
KETUA,

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.

Catatan :

1. apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mulai berlaku pada tanggal setelah pengucapan sumpa/janji Walikota dan Wakil Walikota, maka yang menandatangani pembatalan calon adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
2. formulir ukuran polio

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Kepada:

Yth. Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Di, -

Sulawesi Selatan

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Permintaan cuti Walikota dan Wakil Walikota Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan hormat kami sampaikan permintaan cuti Walikota dan Wakil Walikota Palopo untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Nama : _____

Jabatan : _____

Sebagai pertimbangan Bapak terlampir kami sampaikan jadwal dan jangka waktu, tempat, dan lokasi kampanye. Demikian untuk maklum.

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI-SELATAN

.....